



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMAN
2. Jabatan : KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2
3. NHK : 648161

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.420.000.000

1. Tanah Seluas 131 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 80 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 5500 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 156.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. ----

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.576.000.000

III. HUTANG

Rp. 274.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.302.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.